

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM ASPEK
PIDANA PADA PENYUSUNAN KONTRAK TERKAIT
DENDA KETERLAMBATAN BERDASARKAN
PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

TESIS

Oleh:
Didik Yulianto
201720252004



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Perbuatan Melawan Hukum dalam Aspek Pidana
pada Penyusunan Kontrak terkait Denda
Keterlambatan Berdasarkan Perpres Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Nama Mahasiswa : Didik Yulianto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201720252004
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, 24 Juni 2020

MENYETUJUI:

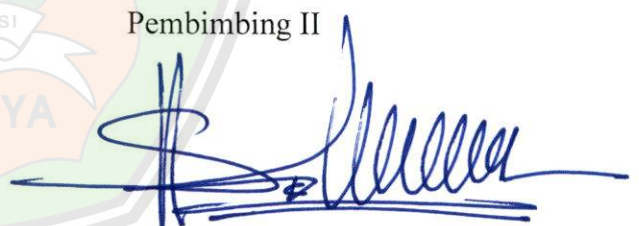
Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ir. HM. Hanafi Darwis., SH., S.Pd., MM

NIDN: 0323015604



Sabela Gayo, SH., MH., Ph.D

NIDN: 307078203

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Perbuatan Melawan Hukum dalam Aspek Pidana
pada Penyusunan Kontrak terkait Denda
Keterlambatan Berdasarkan Perpres Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Nama Mahasiswa : Didik Yulianto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201720252004
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 24 Juni 2020

Jakarta, 24 Juni 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim : Prof. Dr. MS. Tumanggor, S.H., M.Si.
Penguji NIDN: 0304065402

Penguji I : Dr. Noviriska, S.H., M.H
NIDN: 0325117405

Penguji II : Sabela Gayo, SH., MH., Ph.D
NIDN: 307078203

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Lusia Sulastri, SH, MH

NIP 2004464

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIP 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis yang berjudul:

Perbuatan Melawan Hukum dalam Aspek Pidana pada Penyusunan Kontrak terkait Denda Keterlambatan Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 24 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Didik Yulianto

NPM 201720252004

ABSTRAK

Didik Yulianto. 201720252004. Perbuatan Melawan Hukum dalam Aspek Pidana pada Penyusunan Kontrak terkait Denda Keterlambatan Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Pemerintah Indonesia telah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh, antara lain dengan menyusun ketentuan terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah.

Untuk itu maka, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dituangkan dalam dokumen kontrak seharusnya mentaati segala ketentuan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Denda keterlambatan merupakan salah satu dari poin-poin yang dimuat dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang seharusnya pengaturannya di dalam kontrak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum atas kontrak yang memiliki klausul denda keterlambatan pada kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan perpres pengadaan barang/jasa dalam perspektif hukum positif Indonesia dan memberikan masukan pemahaman hukum kepada pemeriksa dan/atau pengawas pengelolaan keuangan negara dalam hal ini Inspektorat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dalam melakukan proses pemeriksaan dapat bertindak sesuai hukum positif Indonesia.

Kata kunci: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah, Denda Keterlambatan.

ABSTRACT

Didik Yulianto. 201720252004. Perbuatan Melawan Hukum dalam Aspek Pidana pada Penyusunan Kontrak terkait Denda Keterlambatan Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

In order to improve the performance, transparency and accountability of the management of state finances, the Government of Indonesia has arranged and implemented an internal control system within the government as a whole, among others by drafting provisions related to procurement of goods / services within the government environment.

For this reason, the implementation of government goods / services procurement as outlined in the contract document should comply with all applicable provisions as positive law in Indonesia.

Late fee is one of the points contained in the government goods / service procurement contract that should be regulated in the contract in accordance with the provisions of the goods / service procurement and legal rules in force.

The writing of this thesis aims to conduct a legal analysis of contracts that have a late fines clause on goods / services procurement contracts that are not in accordance with the regulation of goods / services procurement in a positive Indonesian legal perspective and provide legal understanding input to examiners and / or supervisors in the management of state finances in this case the Inspectorate, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), and the Supreme Audit Board (BPK) so that in conducting the inspection process they can act according to positive Indonesian law.

Keywords: Procurement of Goods / Services, Government, Late fee

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul **“Perbuatan Melawan Hukum dalam Aspek Pidana pada Penyusunan Kontrak terkait Denda Keterlambatan Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”** ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dan tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang berkenan memberikan informasi, masukan serta saran kepada penulis selama masa penulisan. Dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat sedalam-dalamnya kepada:

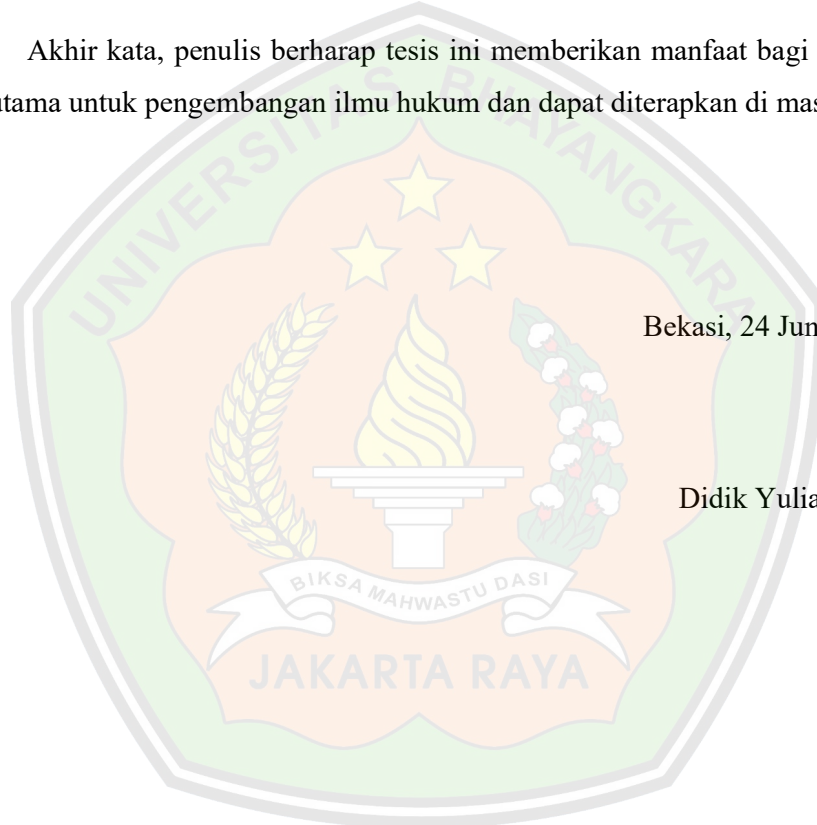
1. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Lusia Sulastri, SH, MH, , selaku Kaprodi S2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH, S.Pd, MM, selaku Dosen Pembimbing Akademik I.
4. Sabela Gayo, SH, MH, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Akademik II.
5. Seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Seluruh Staf TU dan seluruh Staf Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Kedua Orang Tuaku, Bapak Supalal dan Ibu Sringatin yang selalu memberi doa dan restunya.
8. Istri tercinta, Tri Juni Astuti Indah, atas segala doa, motivasi, perhatian, kesabaran dan dukungan lainnya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Kedua anak yang cantik, Annisa Aurora Luthfiana Maharani Yulianto dan Allysa Bilqis Adzra Faiha Yulianto, atas dukungan dan hiburannya, sehingga papa bisa menyelesaikan tugas tesis ini.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Hukum S2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 19.

11. Dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna serta masih butuh pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat.

Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan/atau saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu hukum dan dapat diterapkan di masyarakat.



Bekasi, 24 Juni 2020

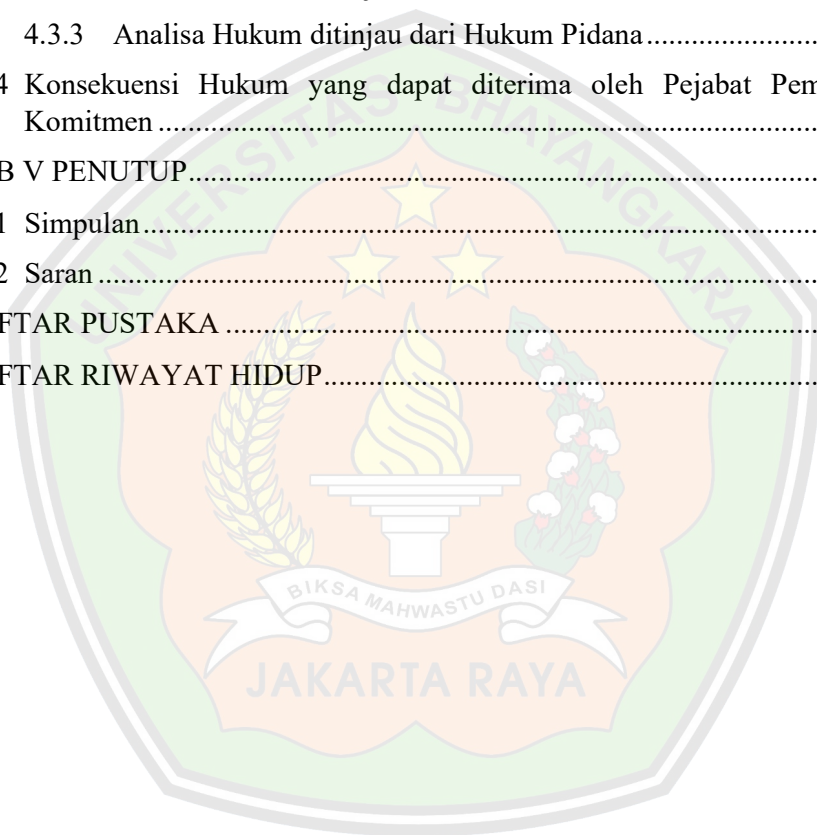
Didik Yulianto

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
LEMBAR PERNYATAAN	3
ABSTRAK	4
ABSTRACT	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	8
DAFTAR GAMBAR	12
DAFTAR SINGKATAN	13
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan Masalah	9
1.3. Identifikasi Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah	10
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.5.1 Tujuan Penelitian	11
1.5.2 Manfaat Penelitian	11
1.6. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	11
1.6.1 Kerangka Teori	11
1.6.2 Kerangka Konseptual	17
1.6.3 Kerangka Pemikiran	17
1.7. Metode Penelitian	18
1.7.1 Definisi Metode Penelitian	18
1.7.2 Metode Pendekatan Penelitian	20
1.7.3 Sifat Penelitian	20
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data	21
1.7.5 Metode Analisis Data	22
1.8. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1 Tinjauan Bidang Hukum Perdata	24

2.1.1.	Gambaran Umum Hukum Perdata.....	24
2.1.2.	Asas – Asas Perjanjian dari Hukum Perdata	25
2.1.3.	Ketentuan dalam Hukum Perdata	30
2.1.4.	Perbuatan Melawan Hukum dari Aspek Hukum Perdata	30
2.2	Tinjauan Hukum Administrasi Negara.....	31
2.2.1.	Gambaran Umum Hukum Administrasi Negara	31
2.2.2.	Asas – Asas Hukum Administrasi Negara.....	33
2.2.3.	Wewenang Pemerintahan	35
2.2.4.	Ketentuan dalam Hukum Administrasi Negara terkait Pengelolaan Keuangan Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	40
2.3	Gambaran Umum Hukum Pidana.....	45
2.3.1.	Gambaran Umum Hukum Pidana.....	45
2.3.2.	Asas-asas dalam Hukum Pidana.....	46
2.3.3.	Teori-Teori Pemidanaan	51
2.3.4.	Jenis – Jenis Pidana.....	52
2.3.5.	Perbuatan Melawan Hukum pada Aspek Hukum Pidana.....	58
2.3.6.	Pertanggungjawaban Pidana	60
2.3.7.	Tindak Pidana Korupsi	64
2.4	Penafsiran Hukum	68
BAB III KONSEKUENSI HUKUM ATAS KONTRAK YANG MEMILIKI KLAUSUL DENDA KETERLAMBATAN PADA KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERPRES PENGADAAN BARANG/JASA		
3.1	Gambaran Umum Permasalahan	72
3.2	Analisa Hukum ditinjau dari Hukum Perdata.....	80
3.3	Akibat Hukum Persetujuan.....	88
3.4	Konsekuensi Hukum atas Kontrak yang Memiliki Klausul Denda Keterlambatan pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang Tidak Sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa.....	92
BAB IV KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN YANG DALAM MENYUSUN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA TIDAK SESUAI DENGAN PERPRES PENGADAAN BARANG DAN JASA.....		
		94

4.1 Dampak dari adanya Klausul Denda Keterlambatan pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	94
4.2 Alasan yang terjadi munculnya Klausul Denda Keterlambatan pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	96
4.3 Analisa Hukum Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	97
4.3.1 Analisa Hukum ditinjau dari Hukum Administrasi Negara	97
4.3.2 Analisa Hukum ditinjau dari Hukum Perdata	107
4.3.3 Analisa Hukum ditinjau dari Hukum Pidana	109
4.4 Konsekuensi Hukum yang dapat diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen	116
BAB V PENUTUP.....	120
5.1 Simpulan.....	120
5.2 Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	130



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 *Flowchart* Kedudukan Hukum atas Adanya Klausul Denda Keterlambatan pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Hukum Positif di Indonesia
- Tabel 4.1 Kondisi Pelaksanaan Pekerjaan
- Tabel 4.2 Perbandingan Perhitungan Denda Keterlambatan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kebebasan Individu di Lingkungan Masyarakat/Kelompok



DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek voor Indonesie</i>
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PA	: Pengguna Anggaran
Perka	: Peraturan Kepala
Perpres	: Peraturan Presiden
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
SPK	: Surat Perintah Kerja
SSKK	: Syarat-Syarat Khusus Kontrak
TUN	: Tata Usaha Negara

